

**MAHASISWA DAN SANTRI BERSATU
UNTUK MENEGUHKAN ASWAJA DI BUMI NUSANTARA**

Masykur Wahid

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang Banten 42118 Telp.0254-200323 Fax.200022

Email : masykur@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

The Movement of Islamic students in the archipelago from the santri is the movement of Indonesian Islamic students (PMII). Santri moved since 1718 from Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Students moved since 1849 from Doctor Djawa School Batavia (University of Indonesia during the Dutch occupation). To maintain independence with the values of aswaja (ahlussunnah wal jama'ah) from pesantren, PMII was born on April 17, 1960 in Surabaya. From the long history of santri and students united, this paper will explain the consistency of the movement of Islamic students who affirm aswaja in the archipelago with two questions. What is reproduced by PMII to confirm aswaja?, and how is the reproduction managed by PMII? Therefore, by method of ideological criticism, it was found that aswaja as the ideology of the movement is able to reproduce the dialectics of critical students and moderate students in serving the community. The management begins with systematic organizing and real action in academic activities on campus and religious social in the community.

Key words: Santri, Students, Aswaja, Indonesia.

ABSTRAK

Gerakan mahasiswa Islam di Nusantara dari kalangan santri merupakan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Santri bergerak sejak tahun 1718 dari Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Mahasiswa bergerak sejak tahun 1849 dari Dokter *Djawa School* Batavia (Universitas Indonesia pada masa pendudukan Belanda). Untuk memelihara kemerdekaan dengan nilai-nilai aswaja (*ahlussunnah wal jama'ah*) dari pesantren, PMII lahir pada 17 April 1960 di Surabaya. Dari sejarah panjang santri dan mahasiswa bersatu, tulisan ini akan menjelaskan konsistensi pergerakan mahasiswa Islam yang meneguhkan aswaja di Nusantara dengan dua pertanyaan. Apa yang direproduksi oleh PMII untuk meneguhkan aswaja?, dan bagaimana reproduksi itu dikelola oleh PMII? Untuk itu, dengan metode kritik ideologi, ditemukan bahwa aswaja sebagai ideologi gerakan mampu mereproduksi dialektika mahasiswa yang kritis dan santri moderat dalam berdharma kepada masyarakat. Pengelolanya diawali dengan pengkaderan yang sistematis dan aksi nyata dalam kegiatan-kegiatan akademik di kampus dan sosial keagamaan di masyarakat.

Kata kunci : Santri, Mahasiswa, Aswaja, Indonesia.

PENDAHULUAN

Ekstremisme gejolak generasi muda Muslim akhir-akhir ini menuntut peneguhan *ahlussunnah wal jama'ah* (aswaja) di bumi Nusantara. Aswaja *an-Nahdliyah* sebagai ideologi gerakan mahasiswa seiring dengan kehadiran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). PMII tumbuh dan berkembang dari kalangan mahasiswa dan santri. Di bumi Nusantara santri bergerak sejak tahun 1718 dari Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Sementara itu, mahasiswa bergerak sejak tahun 1849 dari Dokter *Djawa School* Batavia (Universitas Indonesia pada masa pendudukan Belanda). Pergerakan mahasiswa dan santri semakin kuat dengan hadirnya gerakan Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 untuk memerdekakan negara Indonesia.

Dari sejarah mahasiswa dan santri memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dengan meneguhkan aswaja, ada dua pertanyaan di dalam tulisan ini. Pertama, apa yang direproduksi oleh PMII untuk meneguhkan aswaja? Kedua, bagaimana reproduksi itu dikelola oleh PMII? Dari dua masalah ini, ditunjukkan untuk menemukan reproduksi PMII yang sejak dilahirkannya untuk meneguhkan aswaja dan untuk mengetahui proses reproduksi yang dikelola oleh PMII hingga mampu bertahan hingga kini dan memberi inspirasi bagi generasi muda aswaja. Untuk menganalisis hasil reproduksi PMII, digunakan teori kritik ideologi.

Kritik ideologi dalam pandangan Jürgen Habermas dipahami dan diterapkan dengan menjelaskan secara kategoris di antara kritik pengetahuan dan kritik ilmu pengetahuan. Ketiganya saling bertautan pada praksis kehidupan sosial manusia. Pengetahuan (*knowledge*) merupakan kegiatan, proses, kemampuan, dan bentuk kesadaran manusiawi. Sedangkan, ilmu pengetahuan (*science*) merupakan salah satu bentuk pengetahuan yang direfleksikan secara metadis. Apabila keduanya membeku, maka menjadi delusi atau kesadaran palsu (*false consciousness*). Delusi merintangi praksis sosial manusia untuk merealisasikan kebaikan, kebenaran, kebahagiaan, dan kebebasannya, yang mengakibatkan keduanya berubah menjadi ideologis. Oleh karena itu, kritik ideologi digunakan untuk membebaskan dan sekaligus menyembuhkan masyarakat yang mendekam dalam kungkungan ideologi.¹

PEMBAHASAN

Ideologi aswaja dianut di dunia jauh sebelum lahir ideologi Pancasila di Indonesia. Istilah aswaja dikenalkan pertama kali sebagai aliran dalam Islam pada *ashab al-Asy'ari* atau

¹ F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009, hlm. 209-210.

Asya'irah atau Sunni, seperti al-Baqillani (w. 403 H), al-Baghdadi (w. 505 H), al-Juwaini (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H), asy-Syahrastani (w. 548 H), ar-Razi (w. 606), namun tidak secara tegas membawa aswaja sebagai *madzhab*. Pernyataan yang tegas dilakukan oleh al-Zabidi (w. 1205 H/1790 M) pada abad ke-18 dalam *ithaff sadat al-muttaqin (syarah Ihya 'Ulumuddin)* bahwa *idza uthliqa ahlussunnah fa al-murad bihi al-Asy'irah wa al-Maturidiyyah* (jika disebutkan *ahlussunnah*, maka yang dimaksud adalah penganut Asy'ari dan Maturidi).²

Said Aqiel Siradj yang mengutip *Dhuhr al-Islam* karya Ahmad Amin (Dar al-Kitab al-Arabi, 1953: 96) menjelaskan bahwa “aswaja adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan pada dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan (seimbang-adil), dan toleran”. Moderasi (*tawassuth*) aswaja dijelaskan pada metode pengambilan hukum (*istinbath*) yang tidak hanya menggunakan *nash*, akan tetapi juga memperhatikan posisi akal. Dengan kata lain, selalu menjembatani antara wahyu dan rasio (*al-ra'y*). *Manhaj* moderasi ini diimplementasikan oleh imam madzhab empat [Imam Abu Hanifah al-Nu'man (w. 150 H), Imam Malik ibn Anas (w. 179 H), Imam Syafei'i (w. 204 H), Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H)] dan generasi berikutnya dalam memproduksi hukum-hukum pranata sosial (fikih).

Seimbang (*tawazun*) aswaja berkaitan dengan sikap dalam politik. Aswaja tidak membenarkan kelompok ekstrem. Bahkan, jika berhadapan dengan penguasa lalim, aswaja langsung mengambil jarak dan mengadakan aliansi. Dengan kata lain, suatu saat aswaja bisa akomodatif, namun saat lain bisa berbeda dalam batas seimbang. Adil (*ta'adul*) aswaja direfleksikan pada peran di dalam kehidupan sosial, cara bersosialisasi, dan kondisi sosial budayanya. Sementara itu, toleran (*tasamuh*) aswaja yang tanpa mengkafirkan *ahl al-qiblat* terlihat di dalam kehidupan sosial dengan sesama Muslim dan umat manusia.³

Ideologi aswaja *an-Nahdliyah* yang dianut oleh KH. Wachid Hasyim bin Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari mampu menengahi perbedaan pendapat panitia kecil yang berjumlah delapan orang [Ir. Soekarno (Ketua), Drs. Moh. Hatta, Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo, KH. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikoesoemo, Rd. Otto Iskandardinata, Moh. Yamin, dan Mr. Alfred Andre Maramis] dalam menyusun naskah Pancasila sebagai

² Abu Hasan al-Asy'ari (w. 324 H) dan Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H). Lihat Said Aqil Siradj, 1997. *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, hlm. 19.

³ Said Aqil Siradj, 1997. *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 20-21.

ideologi negara. Perbedaan pendapat dari panitia kecil yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasar syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak mendasarkan hukum salah satu agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan ini, dibentuk kembali suatu panitia kecil yang berjumlah sembilan orang yang dikenal sebagai Panitia Sembilan yang anggotanya berasal dari golongan nasionalis, yaitu: Ir. Soekarno (Ketua), Drs. Moh.Hatta, Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo K.H. Wachid Hasyim, Moh Yamin, Mr. Alfred Andre Maramis, KH. Abdul Kahar Moezakir, Abikusno Tjokrosoejoso, dan H. Agus Salim.

Panitia Sembilan bersidang pada 22 Juni 1945 yang menghasilkan kesepakatan, menurut Ir. Soekarno, merupakan suatu modus kesepakatan yang dituangkan di dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945, alinea keempat dalam rumusan dasar negara: (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Rumusan dasar negara ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Namun, pada 7 Agustus 1945 (Kan Poo No.72/2605 k.11) dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, 18 Agustus 1945. 20 menit sebelum sidang dimulai, diadakan pertemuan yang membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan Piagam Jakarta, terutama yang menyangkut perubahan sila pertama Pancasila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, Pancasila lahir dari pluralitas keinginan masyarakat yang ingin memiliki tatanan sosial yang lebih menjamin kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang ditopang oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam satu wadah bangsa dan negara Indonesia.⁴

Ideologi Aswaja *an-Nahdliyah*, Etika Gerakan

Ideologi Pancasila merupakan titik temu (*kalimatus sawa*) dari berbagai ideologi pergerakan mahasiswa yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, termasuk ideologi aswaja yang dianut oleh PMII. Ideologi (*ideology*) dipahami dalam *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge* karya Karl Mannheim sebagai sangsi atas

⁴ Kunawi Basyir, dkk. 2013. *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Edisi Pertama. Surabaya: Sunan Ampel Press, hlm. 16-22.

gagasan-gagasan (*ideas*) dan penjelasan-penjelasan yang diajukan oleh lawan.⁵ Ideologi Pancasila merupakan sangsi atas gagasan liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, marxisme, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Selain itu, Pancasila sebagai sangsi atas semua bentuk penyimpangan, pemberontakan, separatisasi, terorisme, konflik dan kekerasan sosial, dan gerakan lainnya yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitu juga, ideologi aswaja dipahami sebagai sangsi atas ekstremisme gerakan politik (*harakah siyasiyah*) murni, teologi (*kalam*), dan madzhab (fikih), seperti Syi'ah, Khawarij, Jabariyah (fatalisme), Qadariyah Ula, Murji'ah, dan Wahhabiyah, .

Sebagai penganut ideologi aswaja *an-Nahdliyah*, PMII lahir pada tanggal 17 April 1960 melalui proses perjuangan santri di Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama (IPNU). Awalnya dari Kongres ke-3 IPNU pada tanggal 27-31 Desember 1958 dengan pembentukan Departemen Perguruan Tinggi IPNU, karena banyak mahasiswa yang menjadi anggotanya. Selanjutnya, pada Konferensi Besar IPNU tanggal 14-16 Maret 1960 di Kaliurang, Yogyakarta, diputuskan suatu wadah mahasiswa NU yang terpisah secara struktural dari IPNU-IPPNU. Akhirnya, dilakukan musyawarah di Surabaya tanggal 14-16 April 1960 yang memutuskan nama PMII dan penyusunan Peraturan Dasar PMII yang dinyatakan mulai berlaku 17 April. Ada 13 pendiri PMII, yaitu: Chalid Mawardi, Said Budairy, M. Sobich Ubaid, M. Makmun Syukri BA, Hilman, H. Ismail Makky, Munsif Nahrawi, Nuril Huda Suady HA, Laily Mansur, Abd Wahad Jailani, Hisbullah Huda, M. Cholid Narbuko, dan Ahmad Husain.

PMII secara tegas menyatakan untuk menjaga dan memelihara ideologi aswaja sebagai santri dan mahasiswa Islam dan ideologi Pancasila sebagai mahasiswa Indonesia. Karakteristik mahasiswa dan santri terlihat pada figur ketua umum Pengurus Besar PMII dari masa ke masa hingga kini: Mahbub Junaidi (1960-1961; 1961-1963; 1963-1967), M. Zamroni (1967-1970; 1970-1973), Abduh Paddare (1973-1976), Ahmad Bagdja (1977-1981), Muhyiddin Arubusman (1981-1984), M. Iqbal Assegaf (1988-1991), Ali Masykur Musa (1991-1994), Muhaimin Iskandar (1994-1997), Syaiful Bahri Anshori (1997-2000), Nusron Wahid (2000-2002), Malik Haramain (2003-2005), Hery Herianto Azumi (2005-2007), Rodli

⁵ Karl Mannheim. 1979. *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. London and Henley: Routledge & Kegan Paul, hlm. 49.

Kaelani (2008-2011), Adin Jauharuddin (2011-2013), Aminuddin Ma'ruf (2014-2016; 2017-2020), dan Muhammad Abdullah Syukri (2021-2023).⁶

Tak bisa dipungkiri, orientasi gerakan PMII dilahirkan untuk menguatkan partai NU, sehingga sebagian besar program kerjanya berorientasi politik. Di samping itu, situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat kondusif untuk gerakan politik, sehingga politik menjadi panglima dalam kebijakan pemerintah Orde Lama. Namun, dari masa ke masa PMII mengalami pergeseran orientasi dari misi "keislaman" dan visi "kebangsaan" secara akademik, politik, dan sosial keagamaan. Etika gerakan PMII tercermin dari ideologi aswaja *an-Nahdliyah* yang diperjuangkan, yakni *al-usus al-tsalitsah fi i'tiqadi ahlissunnah wal jama'ah* (bertauhid mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, berfikh mengikuti salah madzhab empat, dan berakhlak tasawuf sesuai dengan perumusan Imam Abu Qosim al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali). KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjelaskan rumusan ketiga *usus* di kalangan aswaja dengan pertanyaan "bagaimana merumuskan ketiga *usus* di dalam kehidupan nyata sekarang?"⁷ Rumusan dasar-dasar umum kehidupan bermasyarakat secara nyata untuk persatuan Indonesia, meliputi bidang-bidang berikut:

- a) Pandangan tentang tempat manusia dalam kehidupan alam,
- b) Pandangan tentang ilmu, pengetahuan, dan teknologi,
- c) Pandangan ekonomi tentang pengaturan kehidupan masyarakat,
- d) Pandangan tentang hubungan individu dan masyarakat (*syakhs* dan *mujtama'*),
- e) Pandangan tentang tradisi dan penyegarannya melalui kelembagaan hukum, pendidikan, politik, dan budaya,
- f) Pandangan tentang cara-cara pengembangan masyarakat, dan
- g) Asas-asas penerapan ajaran agama dalam kehidupan.

Rumusan dasar-dasar umum kehidupan bermasyarakat akan membentuk perilaku individu dan kelompok yang terdiri dari sikap hidup, pandangan hidup, dan sistem nilai (*manhaj al-qiyam al-mutsuliyah*) yang secara khusus akan memberikan karakteristik hidup Aswaja (*syakhshiyatu ma tamassaka bi aqidati ahlissunnah wal jama'ah*).⁸

⁶ Secara singkat sejarah PMII. Lihat *Sejarah Lahirnya PMII (nu.or.id)*.

⁷ Abdurrahman Wahid, "Pengembangan *Ahlussunnah wal Jama'ah* di Lingkungan Nahdlatul Ulama (Sebuah Catatan Pengantar)" dalam Said Aqil Siradj, 1997. *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintasan Sejarah*, hlm. xi.

⁸ Abdurrahman Wahid, "Pengembangan *Ahlussunnah wal Jama'ah* di Lingkungan Nahdlatul Ulama (Sebuah Catatan Pengantar)", hlm. xii.

Tujuh bidang rumusan dasar-dasar umum kehidupan bermasyarakat didiskusikan secara terbuka dalam tiga kerangka umum pandangan NU, yaitu peribadatan, kejujuran, dan moralitas. Pertama, pandangan bahwa keseluruhan hidup ini adalah peribadatan (*al-hayatu 'ibadah kulluha*). Pandangan ini menugaskan kepada umat manusia untuk memelihara kehidupan dengan sebaik-baiknya, termasuk memelihara sumber-sumber daya alam, memelihara sesama manusia dari pemerasan oleh sekelompok kecil yang berkuasa melalui cara-cara yang kontradiksi dengan perikemanusiaan, dan meningkatkan kecerdasan untuk memanfaatkan kehidupan secara lebih baik. Kedua, kejujuran sikap yang merupakan sendi kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Kejujuran sikap ini membuat manusia mampu memahami betapa terbatasnya kemampuan diri sendiri, dan betapa perlunya kepada orang lain, bahkan kepada orang yang berbeda pendirian sekalipun.

Ketiga, moralitas (*akhlaq*) yang utuh dan bulat. Moralitas yang sudah dikembangkan oleh para ulama kita terdahulu, yaitu yang tidak rela jika kita hanya berbicara tentang pemberantasan korupsi namun terus mengerjakannya, tidak dapat menerima ajakan hidup sederhana oleh mereka yang bergelimang dalam kemewahan yang tak terbatas dan umumnya diperoleh secara tidak halal, dan menolak penugasan seluruh wilayah kehidupan ekonomi oleh hanya sekelompok kecil orang belaka.⁹ Tiga kerangka umum ini diimplementasikan oleh PMII untuk mereproduksi dialektika mahasiswa kritis dan santri moderat berderma.

Reproduksi Dialektika Mahasiswa Kritis dan Santri Moderat

Untuk meneguhkan aswaja *an-Nahdliyah*, PMII mereproduksi dialektika mahasiswa kritis dari kalangan santri yang memiliki silsilah keturunan (*nasab*) ilmu pengetahuan pesantren (*traditional Islam sciences*) yang bersambung kepada pengetahuan kenabian (*prophetic knowledge*) Sayyidina Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Pesantren berasal dari kata “santri”, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang berarti “tempat tinggal santri”. Ada beberapa arti santri. Profesor Johns menjelaskan bahwa santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti “guru mengaji”. C.C. Berg menyebut santri berasal dari bahasa India, *shastri*, yang berarti “seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu”. *Sashtri* berasal dari kata *shastra*, yang berarti “buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan”. Selain itu, berdasarkan asal-usul kata santri, pesantren diartikan “lembaga pendidikan

⁹ Abdurrahman Wahid, “Pengembangan *Ahlussunnah wal Jama'ah* di Lingkungan Nahdlatul Ulama (Sebuah Catatan Pengantar)”, hlm. xiii-xv.

keagamaan bangsa Indonesia pada masa menganut agama Hindu dan Budha yang bernama *mandala* yang di-Islamkan oleh para kyai".¹⁰ Dalam pergeseran dari pendidikan pesantren menuju ke dunia pendidikan tinggi, dialektika mahasiswa kritis yang fundamental direproduksi, yaitu pemahaman ilmu pengetahuan aswaja *an-Nahdliyah* dalam sistem kaderisasi PMII. Aswaja *an-Nahdliyah* dalam PMII ini dikenal juga sebagai sumber nilai dasar pergerakan (NDP).

Kaderisasi PMII merupakan totalitas ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengajarkan dan mengembangkan potensi dzikir, pikir dan amal saleh insan pergerakan. Secara kategoris program kaderisasi PMII dapat dibagi ke dalam tiga bentuk, yakni: Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), Pelatihan Kader Dasar (PKD), dan Pelatihan Kader Lanjutan (PKL). Ketiga tahapan program ini merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, karena kaderisasi PMII sebagai proses terus menerus, baik di dalam maupun di luar program kaderisasi (*long life education*). Di dalam setiap tahapan program senantiasa ditanamkan pemahaman ideologi aswaja *an-Nahdliyah* secara bertingkat, yaitu aswaja *an-Nahdliyah* sebagai dasar-dasar keyakinan (*usus al-i'tiqad*), aswaja *an-Nahdliyah* sebagai metode berpikir (*manhaj al-fikr*), dan aswaja *an-Nahdliyah* sebagai metode gerakan (*manhaj al-harakah*).

Aswaja sebagai dasar-dasar keyakinan tercermin di dalam rumusan *al-usus al-tsalatsah fi i'tiqadi ahlissunnah wal jama'ah* di atas. Dasar-dasar keyakinan ini sudah menjadi konsensus (*ijtima'*) yang sesuai dengan kaidah *al-ashlu baqa'u ma kana 'ala ma kana* (asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya). Dasar-dasar keyakinan ini dapat dipastikan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam walaupun tetap belum terwujud secara sempurna. Perpecahan (*firqah*) hebat antar umat Islam diakibatkan oleh perbedaan besar dalam soal-soal luar keyakinan, sehingga yang terjadi itu perbedaan dalam penerapan keyakinan itu sendiri dalam masalah-masalah nyata yang timbul dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Aswaja *an-Nahdliyah* menggunakan segala kelengkapan (alat) dan *istinbath al-ahkam*, termasuk *ushul al-fiqh*, *qawaid al-fiqh*, dan *hikmat al-tasri'* dalam merumuskan keputusan hukum agama, sedangkan yang lain hanya menggunakan *istinbath* dari (pengambilan langsung dari dalam *naqli*, tanpa mementingkan penggunaan alat-alat tersebut atas dalil *naqli*) dalam mengambil keputusan. Bagaimanapun juga, tidak

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier. 2011. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*. Cet. Kedelapan. Jakarta: LP3ES, hlm. 41.

akan ada kesepakatan cara (*wasā'il*, metode) di kalangan kaum Muslimin, dan tetap akan ada perbedaan pendapat (*ikhtilaf al-ara'*) di antara mereka sebagai akibat sebagaimana diperkuat dengan kaidah *ikhtilaf al-ummah rahmah* (perbedaan umat adalah rahmat).¹¹

Aswaja sebagai metode berpikir didasarkan pada kaidah *al-muhafadhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdlu bi al-jadidi al-ashlah* (menjaga tradisi yang baik dan mengaplikasikan inovasi yang lebih baik). Dengan kaidah ini, ada empat metode berpikir yang diajarkan oleh aswaja *an-Nahdliyah*, sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu moderat (*tawassuth*), seimbang dan adil (*tawazun* dan *ta'adul*), dan toleransi (*tasamuh*). Dalam penerapannya, berpikir moderat menengahi antara dua pikiran yang ekstrem, Qadariyah dan Jabariyah, ortodoks Salaf dan rasionalisme Mu'tazilah, dan sufisme falsafi dan sufisme salafi. Berpikir seimbang dan adil dibangun untuk persoalan-persoalan yang berdimensi social politik, menciptakan integritas, dan solidaritas sosial umat. Berpikir toleran terhadap pluralisme pemikiran. Toleransi terhadap berbagai pendapat, mampu meredam berbagai konflik internal umat.¹²

Aswaja sebagai metode gerakan. Sebagai metode gerakan, aswaja merupakan sebuah bentuk respons para Sahabat *Sayyidina* Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* atas situasi umat yang kacau (*chaos*) saat itu. Karenanya, tak bisa dipungkiri bahwa kelahiran kelompok politik Islam (*haraqah siyasah* atau *firqah*) dilatarbelakangi oleh situasi politik saat itu. Singkatnya, pada masa Sahabat *Sayyidina* Ali bin Abi Thalib terjadi situasi politik yang kacau, masing-masing pihak saling menuding, menambah rumit kondisi umat Islam. Pihak setia Sahabat *Sayyidina* Ali merasa Sahabat *Sayyidina* Ali yang paling berhak atas kepemimpinan dan merasa telah dibohongi dan dikhianati oleh pihak Muawiyah. Sebaliknya, pihak Muawiyah merasa Muawiyah adalah pemimpin yang sah dan arbitrase (*tahkim*) adalah keadaan yang sudah ditakdirkan oleh Allah, sehingga tidak boleh digugat, bahkan yang menggugat dianggap melawan Allah *Subhanallahu ta'ala*. Sementara itu, kelompok Khawarij menganggap kedua belah pihak adalah *thagut* dan telah *kafir* dari hukum Allah, sehingga halal darahnya (untuk dibunuh).¹³ Tak hanya kelompok Khawarij yang lahir secara ekstrem, juga Syi'ah, Jabariyah, Qadariyah Ula, dan Murji'ah, kecuali Aswaja Ula.

¹¹ Abdurrahman Wahid, "Pengembangan *Ahlussunnah wal Jama'ah* di Lingkungan Nahdlatul Ulama (Sebuah Catatan Pengantar)", hlm. ix-x.

¹² Husein Muhammad, "Memahami Sejarah *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang Toleran dan Anti Ekstrem", dalam Imam Baehaqi (Ed.), 2000. *Kontroversi Aswaja Aula Perdebatan dan Interpretasi*. Yogyakarta: LKiS, 37-41.

¹³ Lihat *Ahlussunnah wal Jamaah Sebagai Manhajul Fikr* (nu.or.id).

Aswaja Ula berada di tengah (moderat atau tidak ekstrem) di antara pertikaian antar kelompok politik tersebut. Aswaja Ula tidak mudah menuduh seorang kafir. Aktivitasnya bersifat kultural (*tsaqafiyah*), ilmiah, dan berusaha mencari jalan kebenaran secara jernih. Aswaja Ula dipelopori oleh Imam Abu Sa'id Hasan ibn Abi Hasan Yasar al-Bashri dan para tabi'in yang lain. Aswaja Ula merujuk pada surat al-Hajj ayat 54: "Dan, agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya al-Qur'an itulah yang *haq* dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus."¹⁴

Oleh karenanya, tiga tingkatan aswaja *an-Nahdliyah* dalam kaderisasi PMII merupakan dialektika mahasiswa kritis yang dikaji secara ilmiah dalam proses pribumisasi aswaja di bumi Nusantara. Dengan dialektika kritis, aswaja *an-Nahdliyah* bergerak dinamis sesuai dinamika politik, sosial, ekonomi dan budaya yang terus menerus berkembang. Untuk itu, dibutuhkan ruang praksis sosial untuk mempraktikkan aswaja *an-Nahdliyah* tersebut dalam memberdayakan masyarakat yang sejahtera dan maslahat. Reproduksi santri moderat yang berderma merupakan ruang praksis sosial yang dikelola oleh PMII dalam pemberdayaan masyarakat dan perempuan. PMII memfasilitasi kegiatan-kegiatan bakti sosial keagamaan kepada masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam pengorganisasian Korp PMII Putri (KOPRI). Kegiatan-kegiatan sosial dalam pemberdayaan perempuan tercermin di dalam visi dan misi KOPRI. Visinya untuk terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Misinya untuk menginternalisasikan nilai keadilan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di dalam membangun masyarakat berkeadilan gender.

KESIMPULAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang direproduksi oleh PMII untuk meneguhkan aswaja, yaitu dialektika mahasiswa kritis dan santri berderma dengan tiga tahapan aswaja *an-Nahdliyah*: Aswaja sebagai dasar-dasar keyakinan, metode berpikir, dan metode gerakan. Ketiga tahapan aswaja *an-Nahdliyah* ini dikelola di dalam sistem kaderisasi PMII yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dari generasi ke generasi. Dalam praktiknya, ketiga tahapan aswaja *an-Nahdliyah* diimplementasikan di dalam pemberdayaan

¹⁴ Said Aqil Siradj, 1997. *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 49-50.

masyarakat dan perempuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkeadilan gender, sejahtera, dan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- F. Budi Hardiman. 2009. *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Imam Baehaqi (Ed.), 2000. *Kontroversi Aswaja Aula Perdebatan dan Interpretasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Karl Mannheim. 1979. *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. London and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Kunawi Basyir, dkk. 2013. *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Edisi Pertama. Surabaya: Sunan Ampel Press
- Said Aqil Siradj. 1997. *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM.
- Zamakhsyari Dhofier. 2011. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*. Cet. Kedelapan. Jakarta: LP3ES.

Internet

- Ahlussunnah wal Jamaah Sebagai Manhajul Fikr (nu.or.id)*.
- Sejarah Lahirnya PMII (nu.or.id)*